



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

Pages : 1840–1852

Etika Sejarah dan Perkembangan Studi Islam
di Indonesia dari Masa ke Masa

Aggi Saputra, Fauzianor, Muhammad Nabil Muzakki, Surya Sukti

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Palangka Raya

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2764>

How to Cite this Article

APA : Saputra, A., Fauzianor, F., Muzakki, M. N. ., & Sukti, S. . (2024). Etika Sejarah dan Perkembangan Studi Islam di Indonesia dari Masa ke Masa. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 1840 - 1852. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2764>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Sejarah dan Perkembangan Studi Islam di Indonesia dari Masa ke Masa

Aggi Saputra^{1*}, Fauzianor², Muhammad Nabil Muzakki³, Surya Sukti⁴

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: suryasukti1438@gmail.com

Diterima: 27-12-2024

| Disetujui: 28-12-2024

| Diterbitkan: 29-12-2024

ABSTRACT

The history of Islamic education is essentially closely related to Islamic history so that the periodization of the history of Islamic education is within the periods of Islamic history itself, namely the classical, medieval and modern periods. In Indonesia, this period can be divided into the phase of the arrival of Islam, the phase of development and establishment of the Islamic kingdom, the phase of the arrival of Westerners, the Japanese colonial phase, the independence phase, and the post-independence phase. In each phase, Islamic education develops with different characteristics. However, in every phase of the development of Islamic education, a style of da'wah or Islamization is always inherent which functions and transforms Islamic values in the implementation of education.

Keywords: History; Islam

ABSTRAK

Sejarah pendidikan Islam hakikatnya sangat berkaitan dengan sejarah Islam sehingga periodisasi sejarah pendidikan Islam berada dalam periode-periode sejarah Islam itu sendiri, yaitu periode klasik, pertengahan, dan modern. Di Indonesia, periode tersebut dapat dibagi dikelompokkan ke dalam fase datangnya Islam, fase perkembangan dan berdirinya kerajaan Islam, fase kedatangan orang Barat, fase penjajahan Jepang, fase kemerdekaan, dan fase pasca kemerdekaan. Dalam setiap fase itu, pendidikan Islam berkembang dengan ciri yang berbeda-beda. Meskipun demikian, pada setiap fase perkembangan pendidikan Islam tersebut, corak dakwah atau Islamisasi senantiasa melekat yang berfungsi dan mentransformasi nilai-nilai keislaman di dalam penyelenggaraan pendidikan.

Katakunci: Sejarah; Islam

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan upaya pembinaan dan pengembangan potensi manusia agar tujuan kehadirannya di dunia ini sebagai hamba Allah dan sekaligus Khalifah Allah tercapai sebaik mungkin. Potensi yang dimaksud meliputi potensi jasmaniah dan rohaniyah seperti akal, perasaan, kehendak dan aspek rohaniyah lainnya. Dalam wujudnya, pendidikan Islam dapat menjadi upaya umat secara bersama, atau upaya lembaga kemasyarakatan yang memberikan jasa pendidikan bahkan dapat pula menjadi usaha manusia itu sendiri untuk mendidik dirinya sendiri. Ruang lingkup pendidikan Islam meliputi keseluruhan ajaran Islam yang terpadu dalam keimanan (akidah) serta ibadah dan muamalah yang implikasinya mempengaruhi proses berpikir, merasa, berbuat dan terbentuknya kepribadian yang pada gilirannya terwujud dalam Akhlāk al – Karīmah sebagai wujud manusia muslim.¹

Keberadaan pendidikan Islam di Indonesia tidak lepas dari proses masuknya kerajaan-kerajaan Islam di nusantara. Islam masuk ke Indonesia secara damai di bawa oleh para pedagang dan muballigh. Sedangkan Islam masuk negara lain pada umumnya banyak lewat penaklukan, seperti masuknya Islam ke Irak, Iran (Persia), Mesir, Afrika Utara sampai ke Andalusia. Masuknya Islam ke Indonesia tidak bersamaan, ada daerah - daerah yang sejak dini telah dimasuki oleh Islam, di samping ada daerah yan terbelakang dimasuki Islam.

Berkenaan dengan ini telah disepakati bersama oleh sejarawan Islam bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia adalah di Sumatera (sekitar abad ke - 7 dan 8 M).

Sedangkan Islam masuk ke Jawa waktunya diduga kuat berdasarkan batu nisan kubur Fatimah binti Maimun di Laren (Gresik) sekitar tahun 475 H (1082 M). Kedatangan Islam ke belahan Indonesia bagian Timur ke Maluku juga tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan, yang diperkirakan Islam masuk ke daerah ini pada abad ke 14 Masehi. Di Kalimantan khususnya di daerah Banjarmasin proses Islamisasi di daerah ini terjadi kira - kira tahun 1550 M. Adapun di Sulawesi terutama di bagian selatan telah di datangi pedagang muslim pada abad ke - 15 M.

Beberapa pendapat tentang jauhnya rentang waktu antara masuknya orang Islam pertama di Indonesia dengan penyiaran agama Islam pertama di Indonesia, karena “pembawa Islam pertama di Indonesia adalah pedagang, bukan para tentara atau pelarian politik” sehingga mereka tidak langsung mendirikan kerajaan Islam. Selain itu telah ada kerajaan Hindu-Budha yang telah berdiri dan berkuatan besar. Sejarah pendidikan Islam di Indonesia jika dikaitkan dengan sejarah Islam di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam fase-fase berikut: “fase datangnya Islam ke Indonesia, fase berkembangnya melalui proses adaptasi, fase berdirinya kerajaan-kerajaan Islam fase kedatangan orang Barat, fase penjajahan Jepang, fase Indonesia merdeka dan fase pembangunan”.

Namun, penulis hanya memetakan Pendidikan Islam di Indonesia ke dalam tiga garis besar yaitu sebelum penjajahan, masa penjajahan dan setelah kemerdekaan. Untuk melihat sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, maka pembahasan ini akan difokuskan pada keadaan pendidikan Islam sebelum penjajahan, perkembangan pendidikan Islam pada masa penjajahan serta penerapan pendidikan Islam setelah kemerdekaan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah studi pustaka, dimana dengan mengumpulkan data dengan cara memahami dan mempelajari data/teori-teori dari berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan pembahasan makalah ini.

HASIL PEMBAHASAN

Pendidikan Islam Sebelum Zaman Penjajahan

Sejak awal berkembangnya Islam, pendidikan menjadi prioritas utama masyarakat muslim Indonesia. Islamisasi menjadi alasan utama melaksanakan pengajaran Islam walaupun dengan cara yang sangat sederhana. Kebutuhan masyarakat Islam dengan pendidikan mendorong masyarakat Islam Indonesia mengadopsi dan mentransfer lembaga keagamaan dan sosial yang sudah ada ke dalam lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Di Jawa umat Islam mengalihkan lembaga keagamaan Hindu-Budha menjadi pesantren. Umat Islam Minangkabau mengambil alih surau yang merupakan peninggalan adat masyarakat setempat menjadi lembaga pendidikan Islam dan di Aceh meunasah (madrasah) dikembangkan menjadi lembaga pendidikan Islam.

Adanya Islamisasi dan pendidikan Islam yang sangat pesat di Nusantara pada saat itu berhasil membentuk masyarakat Islam yang mendorong lahirnya Kerajaan Islam di Nusantara. Beberapa kerajaan Islam pada masa sebelum zaman penjajahan adalah: Pertama, Kerajaan Perlak, Kerajaan Pasai, Kerajaan Aceh, dan Kerajaan Siak di Sumatera. Kedua, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan Mataram di Jawa. Ketiga, Kerajaan kembar Gowa-Tallo di Sulawesi Selatan.

Kerajaan Islam di Sumatra, Pertama: Pada abad ke 1 H/7 M, kawasan Asia Tenggara mulai berkenalan dengan tradisi Islam. Hal ini terjadi ketika para pedagang Muslim yang berlayar di kawasan ini singgah untuk beberapa waktu. Pengenalan Islam lebih intensif khususnya di Semenanjung Melayu dan Nusantara berlangsung beberapa abad kemudian. Tradisi pelayaran dan perdagangan di Asia Tenggara dan Nusantara memberikan catatan sejarah tentang peranan bangsa Arab, Persia dan Gujarat dalam melakukan pelayaran dan perdagangan di kawasan ini. Kehadiran mereka di beberapa pelabuhan Asia Tenggara pada tahap awal setidaknya telah memperkenalkan kepada penduduk setempat tata cara melaksanakan ibadah Islam.⁵ Hal inilah yang merupakan cikal bakal munculnya Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang memberikan pengaruh dalam peradaban dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Adapun Kerajaan- kerajaan Islam di nusantara adalah sebagai berikut:

1. Kerajaan Islam di Sumatera

- a. Kerajaan Perlak, Pada tahun 173 H, sebuah kapal layar dengan pimpinan “Makhada Khalifah” dari Teluk Kambay Gujarat berlabuh di Bandar Perlak dengan membawa kira-kira 100 orang anggota dakwah yang terdiri atas orang Arab, Persia dan Hindia. Mereka menyamar sebagai awak kapal dagang dan khalifah menyamar sebagai kaptennya. Makhada Khalifah adalah seorang yang bijak dalam dakwahnya sehingga dalam waktu kurang dari setengah abad, Meurah (raja) dan seluruh rakyat Kemeurahan Perlak yang beragama Hindu-Budha dengan sukarela masuk agama Islam. Selama proses pengislaman yang realtif singkat para anggota dakwah telah banyak yang menikah dengan wanita Perlak. Kerajaan Perlak sebagai kerajaan Islam pertama giat melaksanakan pengajaran dan pendidikan Islam.

Belum didapatkan data bagaimana pendidikan Islam dilangsungkan, tetapi diduga besar pendidikan dilangsungkan di masjid istana bagi keluarga pembesar, di masjid-masjid, di rumah-rumah serta surau-surau bagi masyarakat umum.

Materi pembelajaran pendidikan Islam dibagi menjadi dua tingkatan: pertama yaitu tingkat dasar yang terdiri atas pelajaran membaca, menulis, bahasa Arab, pengajian Al Qur'an, dan ibadah praktis. Kedua yaitu tingkat yang lebih tinggi dengan materi-materi ilmu fikih, tasawuf, ilmu kalam, dan lain sebagainya.

Tidak terlalu banyak sumber yang menjelaskan geliat perkembangan sistem pendidikan Islam pada kerajaan ini. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena kerajaan ini berdiri pada awal datangnya Islam. Menurut beberapa sumber, data yang didapatkan hanya menceritakan geliat dakwah dan penyiaran Islam di kerajaan tersebut. Rajanya yang keenam bernama "Sultan Mahdum Alaudin Muhammad Amin", terkenal sebagai Sultan yang arif bijaksana lagi alim. Beliau adalah seorang ulama yang mendirikan perguruan tinggi Islam. Lembaga majelis taklim tinggi yang dihadiri khusus oleh para murid yang sudah alim. Lembaga tersebut juga mengajarkan dan membacakan kitab-kitab agama yang berbobot pengetahuan tinggi, misalnya kitab al-Umm karangan Imam Syafi'i

Kedua: Kerajaan Pasai. Kerajaan Pasai diperkirakan berdiri pada awal atau pertengahan abad ke-13 M sebagai hasil Islamisasi daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang muslim sejak abad ke-7 M.

Para ahli sejarah umumnya berpendapat bahwa pendiri kerajaan ini adalah "Sultan Malik al-Saleh".⁹ Menurut keterangan Ibnu Batutah yang singgah di Kerajaan Pasai pada tahun 1345 M dalam misinya mengelilingi dunia, dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan yang berlaku di Kerajaan Pasai adalah materi pendidikan dan pengajaran agamanya bermazhab Syafi'i; sistem pendidikannya informal berupa majlis taklim dan halakah; tokoh pemerintahan merangkap ulama; biaya pendidikan bersumber dari negara.

Ketiga: Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh Darussalam yang diproklamasikan pada 12 Zulkaedah 1916 H (1511 M) menyatakan perang terhadap buta huruf dan buta ilmu. Para sultan Aceh sangat mencintai ilmu dan ulama.¹¹ Hal ini sejalan dengan wahyu pertama yang memerintahkan kepada manusia untuk membaca dan menuntut ilmu pengetahuan.

Mungkin hal inilah yang menjadi dasar dari pemberantasan buta huruf dan buta ilmu pada masa itu. Agama dan pengetahuan mendalam tentang agama yang dianutnya menjadi tolok ukur pada masa itu tanpa memandang asal negara dan bangsanya.

Lembaga pendidikan yang merupakan pusat pengembangan pendidikan Islam di Kerajaan Aceh adalah "Balai Seutia Hukama" merupakan lembaga ilmu pengetahuan, tempat berkumpulnya para ulama ahli pikir dan cendekiawan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Departemen yang mengurus masalah pendidikan dan pengajaran disebut Balai Jamaah Himpunan Ulama, yaitu kelompok studi para ulama untuk bertukar pikiran membahas persoalan-persoalan pendidikan.

Jenjang dan struktur pendidikannya pun sudah tersusun sebagaimana Lembaga pendidikan formal saat ini. Jenjang pendidikannya yaitu :

- a. Meunasah (madrasah), terdapat di kampung dan berfungsi seperti sekolah dasar. Materi yang diajarkan meliputi menulis dan membaca huruf Arab, ilmu agama, bahasa melayu, akhlak, dan sejarah Islam.
- b. Rangkang, setingkat madrasah tsanawiyah. Jenjang pendidikan ini diselenggarakan di tiap mukim.

Materi yang diajarkan adalah bahasa Arab, ilmu bumi, sejarah, ilmu hisab, akhlak, dan lain-lain.

- c. Dayah, terdapat di daerah Ulubalang setingkat madrasah aliyah. Terkadang dilaksanakan di masjid, materi yang diajarkan bahasa Arab, fikih, tauhid, tasawuf, ilmu bumi, sejarah dan tata negara, ilmu pasti, dan faraid.
- d. Dayah Teuku Cik, disamakan dengan perguruan tinggi. Pada jenjang ini diajarkan fikih, tafsir, hadis, tauhid, ilmu bahasa dan sastra Arab, sejarah dan tata negara, mantik, ilmu falak, dan filsafat.

Keempat: Kerajaan Siak. Islam pertama kali masuk ke Siak (Riau) diperkirakan tahun 12 M. Hal ini dapat dilihat dari peninggalan kuburan bercorak Islam, "Nizamuddin al-Kamil" seorang laksamana dari Dinasti Fatimiyah yang bertahun 1128 M. Pendidikan di Kerajaan Siak berkembang sangat pesat pada masa "Sultan Syarif Kasim II". Beliau merupakan figur tokoh yang sangat elok.

Di masa pemerintahannya beliau mendirikan sekolah-sekolah seperti: H.I.S pada tanggal 15 September 1915 untuk seluruh penduduk Kesultanan Siak, tahun 1917 beliau membangun Sekolah Agama Islam Madrasah "Taufiqiah Al-Hasyimah," Madrasah "Annisa" (khusus wanita), mendirikan sekolah latihan untuk wanita, dan mendirikan asrama pelajar.

Kerajaan Islam di Jawa. Pertama: Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri kurang lebih setengah abad, antara tahun 1500-1550. Raja pertamanya adalah "Raden Fatah".¹ Awalnya, Raden Fatah adalah santri perguruan Islam di Ampel Denta. Setelah mendapatkan ijazah beliau mendirikan pesantren di Glangan Arum. Di sanalah terbentuk Bayangkara Islah yang akan mendukung pendidikan dan pengajaran Islam.

Proses pendidikan Islam di Kerajaan Demak beriringan dengan kegiatan dakwah Islam yang dilakukan oleh para wali, yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Drajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati.

Dalam melakukan tugas pendidikan Islam kepada masyarakat, para wali menggunakan masjid sebagai sarana pengembangan pendidikan Islam. Demak adalah Masjid tertua di pulau Jawa yang menjadi pusat dan lambang kerajaan. Selain sebagai tempat ibadah masjid Agung Demak juga digunakan sebagai pusat bertukar pendidikan Islam. Selain di masjid Agung pendidikan agama juga diadakan di masjid-masjid umum. Masjid-masjid ini dipimpin oleh seorang badal yang ditugaskan oleh kerajaan. Badal kemudian digelar "Kyai Ageng" yang bertugas menjadi seorang guru.

Pendidikan agama yang dilaksanakan di masjid-masjid diperuntukkan bagi masyarakat umum, sementara keluarga kerajaan belajar agama secara langsung dari wali-wali yang digelar sunan, baik di istana maupun di rumah para wali.

Kedua: Kerajaan Pajang; Perpindahan kekuasaan Kesultanan Demak ke Pajang tidak membawa perubahan berarti terhadap sistem pengajaran dan pendidikan Islam.

Ketiga: Kerajaan Mataram Dalam bidang pendidikan, Kerajaan Islam Mataram membuat beberapa ketentuan khusus, yaitu setiap desa harus menyediakan beberapa tempat pengajian Al Qur'an. Di tempat itulah, diajarkan huruf hijaiyah, barazanji, dan dasar-dasar keislaman lainnya seperti praktik ibadah, rukun iman, dan rukun Islam. Selain itu, pihak kesultanan menghimbau kepada para orang tua agar memerintahkan anak-anak mereka yang telah berusia 7 tahun agar belajar mengaji.

Kerajaan Islam Gowa-Tallo di Sulawesi Selatan; Kerajaan pertama di Sulawesi Selatan adalah kerajaan kembar Gowa-Tallo pada tahun 1605 M. Rajanya ikut masuk Islam bernama I Malli'ngkang Daeng Manyonri bergelar Sultan Abdullah Awwalul Islam. Disusul kemudian oleh I Mangnga'rangngi Daeng Manrabia juga mengucapkan syahadat dan bergelar Sultan Alauddin. Dalam waktu dua tahun,

seluruh rakyatnya telah memeluk Islam. Mubalig yang berjasa atas penyebaran Islam di sana adalah Abdul Qadir Khatib Tunggal bergelar Datok ri Bandang yang berasal dari Minangkabau.

Seperti halnya kerajaan Islam pada umumnya, masjid menjadi pusat pengembangan agama Islam di Sulawesi Selatan. Pada masa pemerintahan raja Gowa ke-15 (1637-1653), Sultan Malikussaid (I Mannuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiung), tiap-tiap negeri memiliki masjid dan di tiap-tiap kampung memiliki langgar.

Selain sebagai tempat ibadah, masjid dan langgar juga digunakan sebagai tempat pengajian agama bagi anak-anak muda di tempat itu. Guru yang mengajarkan Al Qur'an dan ilmu-ilmu Islam lainnya disebut anrong-gurunta atau gurunta.

Selain itu, penulisan dan penyalinan buku-buku agama Islam dari bahasa Melayu ke bahasa Makassar giat dilaksanakan. Berbagai lontara yang asalnya dari Bahasa Melayu diduga berasal dari zaman permulaan perkembangan Islam di Sulawesi Selatan (abad ke 17 dan 18) yang sampai saat ini masih populer dikalangan orang tua-tua Bugis-Makassar. Lontara yang dimaksud antara lain: (1) Lontara perkawinan antara Sayidina Ali dengan Fatimah, putri Rasulullah, (2) Lontara Nabi Yusuf dan percintaan Laila dan Majnun, (3) Sura' Bukuru yang dalam bahasa Bugis dikenal dengan lontara (9) Berbagai mukjizat Nabi Muhammad, dan (10) Lontara tentang wewenang kali (kadhi) menurut sara' dan banyak yang lain.

Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan

Pendidikan Islam Masa Kolonial Belanda

Kondisi pendidikan Islam pada zaman Belanda sangat memprihatinkan. Umat Islam terus-menerus mendapatkan tekanan dan perlakuan yang tidak menggembirakan. Namun, umat Islam pantang menyerah, tetap berjuang hingga akhirnya pendidikan Islam mengalami kebangkitan dan kemajuan.

Kemajuan pendidikan tersebut terinspirasi oleh gerakan yang lahir di Timur Tengah, khususnya Mesir dan Saudi Arabiyah oleh orang-orang yang pulang dari menuntut ilmu di kedua negara tersebut.

Munculnya gerakan-gerakan tersebut menyebabkan pendidikan Islam bergerak ke arah yang lebih maju walaupun di sisi lain pemerintah kolonial tidak mendukungnya. Usaha tersebut tidak bisa dikatakan gagal, karena banyaknya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bermunculan yang merupakan pembaruan pendidikan Islam pada masa itu.

Pertama: Jamiat Khair. Konsep Pendidikan Konvergensi Al-Jamiatul Khairiyah yang lebih dikenal dengan Jamiatul Khair didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905.

Organisasi ini membangun lembaga pendidikan walaupun bercorak Islam, tapi merupakan gabungan antara sistem pendidikan Islam dan model Barat. Pelajarannya tidak semata-mata bersifat agama, tetapi diterapkan juga kurikulum berhitung, sejarah, ilmu bumi dengan bahasa pengantar Bahasa Melayu. Bahasa Inggris merupakan bahasa wajib pengganti bahasa Belanda.

Sedangkan pelajaran bahasa Arab sangat ditekankan sebagai alat untuk memahami sumber-sumber Islam. **Kedua: Taman Siswa.** Taman siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta

Konsep pendidikan Taman Siswa meliputi:

1. Sistem among. Sistem ini didasarkan pada: a) kodrat hidup anak, kodrat anak ini terwujud sebagai bakat anak. Pendidik dalam hal ini harus bertindak seperti "pamong". Hal tersebut dilakukan dengan berdiri di belakang anak, tetapi tetap memengaruhi dengan memberi kesempatan kepada anak untuk

mengembangkan diri.

Pendidik baru turun tangan bila anak memang perlu bimbingan dan tuntunan agar anak tidak menyimpang. Inilah maksud dari semboyan Ki Hajar Dewantara yang sering disebut dengan “Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani”; b) dasar yang kedua yaitu kemerdekaan, bahwa peserta didik harus diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Anak didik untuk mengembangkan cipta, rasa, dan karsanya sendiri.

2. Teori Tri Pusat Pendidikan. Dalam penafsirannya mengenai pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengungkapkan adanya Tri Pusat Pendidikan, yaitu pendidikan dapat diperoleh melalui tiga tempat yaitu: dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.

3. Kebudayaan Nasional. Bahan pengajaran dan kurikulum didasarkan dan digali dari kebudayaan nasional, pendidikan budi pekerti mendapat perhatian yang lebih besar karena merupakan proses awal pembentukan watak kepribadian anak.

Untuk pendidikan budi pekerti ini, dapat ditempuh melalui pendidikan formal (etika), pendidikan agama, dan pelajaran kesenian. Oleh karena itu, pelajaran kesenian juga mendapatkan perhatian yang besar. Yang dimaksud kesenian di sini adalah segala macam bentuk kesenian nasional.

Ketiga: Indonesisch Nederland School. Mohamad Syafei mendirikan sekolah INS (Indonesisch Nederlandse School) di Sumatra Barat pada tahun 1926. Tujuannya adalah mendidik anak-anak agar dapat berdiri sendiri atas usaha sendiri dengan jiwa yang merdeka.

Pendidikan yang diberikan adalah pendidikan teori dan pendidikan praktik. Materi yang diberikan bervariasi sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Untuk tingkat ruang rendah, teori 75 % dan praktik 25 %. Sedangkan untuk tingkat ruang dewasa masing-masing 50 %, sehingga para pengamat cenderung untuk menggolongkan INS sebagai sekolah kerja (doesschool). Tujuan utamanya pendidikan dan pengajaran berdasarkan prinsip aktif dengan mengutamakan peranan pekerjaan tangan.

Keempat: Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan tanggal 20 November 1921 di Yogyakarta. Adapun pembaruan yang dilaksanakan Muhammadiyah adalah dengan melakukan modernisasi pesantren.

Setelah berdiri selama delapan tahun, Muhammadiyah mendirikan dua macam lembaga pendidikan, yaitu Madrasah Diniyah yang hanya memberikan pelajaran agama dan sekolah yang memberikan pelajaran agama dan pelajaran umum. Modernisasi yang kedua adalah mendirikan sekolah model Belanda, namun tetap menjadikan pelajaran agama Islam sebagai kurikulum wajibnya.

Kelima: Persatuan Islam. Persatuan Islam (PERSIS) didirikan secara resmi pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok orang Islam yang berminat dalam studi dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Zamzam dan Muhammad Yunus. Berbeda dengan organisasi lain yang berdiri pada awal abad ke-20, PERSIS mempunyai ciri khas tersendiri di mana organisasi ini disamping sebagai organisasi pendidikan, juga dititikberatkan pada pembentukan faham keislaman. Di dalamnya, Muhammad Natsir menerapkan ide pembaruannya yang disebut pendidikan integralistik. Sistem pendidikan terpadu yang tidak memisahkan pengetahuan agama dan umum.

Pendidikan Islam Zaman Penjajahan Jepang

Kehadiran Jepang menjajah Indonesia sangatlah singkat. Namun, Jepang tetap memberikan pengaruh terhadap perkembangan pendidikan Islam. Salah satunya adalah umat Islam lebih leluasa mengembangkan pendidikannya karena peraturan pemerintah Belanda yang diskriminatif tidak

diberlakukan lagi

Selanjutnya, sistem pendidikan Islam saat itu masih sama dengan sistem zaman Belanda, yaitu di samping sistem pendidikan pesantren, juga terdapat sistem pendidikan klasikal, yaitu sistem pendidikan Belanda yang memuat pelajaran agama.

Di tahun-tahun awal penjajahannya, Jepang bahkan menampakkan diri seolah-olah membela kepentingan Islam. Ini merupakan siasat untuk kepentingan Perang Dunia II. Mereka menempuh kebijakan di antaranya:

- a. Kantor Urusan Agama yang pada zaman Belanda disebut Kantoer Voor Islamistis che Zaken dipimpin oleh orang-orang orientalis Belanda, diubah menjadi Sumubi yang dipimpin oleh ulama Islam sendiri, yaitu K.H. Hasyim Asy'ari dari Jombang;
- b. Beberapa pondok pesantren besar sering dikunjungi Jepang dan mendapat bantuan;
- c. Sekolah negeri mendapat pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran Islam;
- d. Jepang juga mengizinkan pembentukan barisan Hisbullah untuk memberikan latihan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam;
- e. Mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Bung Hatta;
- f. Para ulama Islam bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin nasionalis diizinkan membentuk barisan Pembela Tanah Air (Peta). Pembela Tanah Air inilah yang menjadi cikal bakal TNI saat ini;
- g. Umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis A'la Indonesia (MAI) yang bersifat kemasyarakatan.

Walaupun Jepang berusaha mengambil hati umat Islam dengan memberikan kebebasan dalam melaksanakan praktik agama dan mengembangkan pendidikan, ulama tidak semudah itu tunduk kepada pemerintah Jepang apabila hal tersebut bertolak belakang dengan akidah Islam. Misalnya perjuangan K.H. Ahmad Dahlan dan para santri dalam menentang kebijakan kufur pemerintah Jepang yang memerintahkan setiap orang untuk menghadap ke Tokyo setiap pukul 07.00 untuk menghormati kaisar Jepang yang mereka anggap keturunan Dewa Matahari. Akibat sikap tersebut beliau ditangkap dan dipenjarakan Jepang selama 8 bulan.

Penerapan Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan

Pendidikan Islam Masa Orde Lama

Orde Lama merupakan istilah untuk menyebut zaman kepemimpinan Soekarno yang dimulai pada tahun 1945 sampai beliau digantikan oleh Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1965. Jadi, Orde Lama merupakan masa-masa awal kemerdekaan Indonesia. Rakyat baru saja merasakan terlepas dari penjajahan yang membelenggunya selama beberapa abad. Tentu banyak rencana yang tersusun menjadikan seperti apa Indonesia selanjutnya.

Salah satu yang dilakukan pemerintah pada saat itu adalah membentuk dan mengisi struktur pemerintahan negara dengan mendirikan departemen di segala bidang yang akan memperjuangkan cita-cita kemerdekaan. Untuk kepentingan agama dan pendidikannya, pemerintah mendirikan Departemen Agama. Kepentingan pendidikan secara umum ditangani oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Besarnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan Islam menandakan bahwa pendidikan Islam masa ini telah jauh berbeda bila dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda dan Jepang. Setidaknya

pada masa ini pendidikan Islam sudah tidak termarginalkan lagi. Setidaknya ada beberapa sumbangan pemerintah Orde Lama terhadap kemajuan pendidikan Islam di Indonesia, yaitu : **Pertama**, urusan keagamaan dan pendidikan agama yang pada masa penjajahan Belanda bernama Kantoor Voor Islamistische Zaken dan pada masa penjajahan Jepang bernama Shumuka. Setelah Indonesia merdeka diganti menjadi Kementerian Agama yang diresmikan pada 3 Januari 1946.

Kedua, mengeluarkan sejumlah perundang-undangan dan peraturan yang berhubungan dengan pendidikan agama.

Di antaranya:

- a. Peraturan bersama dua menteri yaitu: Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan agama mulai dilaksanakan kelas IV SR sampai kelas VI.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 yang mengatur pendidikan agama di sekolah, baik yang ada di Kementerian Agama, maupun yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. 20 Januari 1951 ditandatangani peraturan bersama Menteri PP&K (Nomor K/652) dengan Menteri Agama (Nomor 1432). Isinya adalah: (1) pendidikan agama mulai diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat; (2) di daerah-daerah yang keagamaannya kurang kuat (misalnya di Sumatra, Kalimantan, dan lain-lain), pendidikan Agama diberikan mulai kelas 1 SR dengan catatan pelajaran pengetahuan umum tidak berkurang jika dibandingkan dengan sekolah yang pendidikan agamanya mulai kelas IV SR; (3) di sekolah lanjutan pertama dan tingkat atas (umum dan kejuruan), diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu; dan (4) pendidikan agama kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua/walinya.

Ketiga, memberikan perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah dan pesantren, pembinaan dan pengembangannya diserahkan kepada Departemen Agama. Berkaitan dengan hal tersebut, Departemen Agama menetapkan beberapa kebijakan: (1) memberi pelajaran agama di sekolah negeri dan partikular; (2) memberi pengetahuan umum di madrasah; dan (3) mendirikan Sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN).

Keempat, memberikan bantuan fasilitas dan sumbangan material kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti mengangkat guru agama, membantu biaya pembangunan madrasah, bantuan buku-buku pelajaran, menegerikan madrasah, dan bantuan lainnya.

Pendidikan Islam Masa Orde Baru

Orde Baru secara harfiah adalah masa yang baru yang menggantikan masa kekuasaan Orde Lama. Namun secara politis "Orde Baru" diartikan suatu masa untuk mengembalikan negara Republik Indonesia ke dalam sebuah tatanan yang sesuai dengan haluan negara sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta falsafah negara Pancasila secara murni dan konsekuen.

Pada masa Orde Baru pendidikan agama telah mengalami kemajuan sesuai dengan keputusan sidang MPRS tahun 1966.

Dengan demikian, sejak tahun 1966 pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi Umum Negeri di seluruh Indonesia. Adapun kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru adalah:

Pertama, masuknya sistem pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Hal tersebut

ditandai dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB 3 Menteri), yaitu Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. Untuk merealisasikan SKB 3 Menteri tersebut, pada tahun 1976, Departemen Agama menetapkan kurikulum standar yang dijadikan acuan oleh madrasah. Surat keputusan tersebut juga menetapkan bahwa ijazah madrasah memiliki nilai yang sama dengan nilai ijazah sekolah umum yang setingkat. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas dan siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum yang setingkat. Keberadaan SKB 3 Menteri ini menyebabkan terjadinya perubahan kurikulum madrasah. Kurikulum madrasah yang awalnya 60% agama dan 40% umum berubah menjadi 30% agama dan 70% umum. Walaupun SKB 3 Menteri ini memberikan dampak positif bagi madrasah, tetapi dalam praktiknya masih ada hambatan dan kelemahan yang perlu diatasi, di antaranya: perbandingan pelajaran umum dan agama dengan persentase 70 : 30 masih menimbulkan reaksi masyarakat sebagai usahabpendangkalan agama di madrasah, tamatan madrasah serba tanggung, pengetahuan agama dan bahasa Arabnya kurang mendalam, input yang kurang baik bagi perguruan tinggi Islam, pengetahun umumnya pun rendah, menyebabkan mereka kalah bersaing dalam memasuki perguruan tinggi umum. Selain itu, juga timbul keraguan masyarakat tentang kualitas madrasah saat itu jika dibandingkan dengan sebelum SKB 3 Menteri dikeluarkan.⁵² Langkah strategis lainnya dalam pengembangan madrasah setara dengan sekolah umum dapat diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa pendidikan Islam dilaksanakan mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang regulasi, bantuan keuangan, dan sumber daya manusia.

Kedua, pembaruan madrasah dan pesantren, baik pada aspek fisik maupun non-fisik. Pembaruan aspek fisik dilakukan dengan melengkapi dan meningkatkan infrastruktur, sarana prasarana, dan fasilitas seperti buku, perpustakaan, dan peralatan laboratorium.

Aspek nonfisik meliputi pembaruan bidang kelembagaan, manajemen pengelolaan, kurikulum, mutu sumber daya manusia, proses pembelajaran, jaringan teknologi dan informasi, dan sebagainya.

Ketiga, pemberdayaan pendidikan Islam nonformal, diantaranya majlis taklim. Pada masa ini, muncul ribuan majlis taklim yang selanjutnya tergabung dalam Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) mulai dari tingkat pusat sampai kabupaten, kota, dan kecamatan.

Keempat, peningkatan atmosfer dan suasana praktik keagamaan. Pemerintah Orde Baru telah mendukung lahirnya berbagai pranata ekonomi, sosial, budaya, dan kesenian Islam. Lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Bank Muamalat Indonesia (BMI), Harian Umum Republika, Bayt Alquran, dan lain-lain. Semua ini merupakan buah dari keberhasilan pembaruan pendidikan Islam.

Pendidikan Islam Masa Reformasi

Era Reformasi dalam istilah lazim yang digunakan di Indonesia adalah masa pemerintahan yang dimulai setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998.⁵⁷ Sejalan dengan berbagai kebijakan yang ada, keadaan pendidikan Islam secara umum jauh lebih baik daripada keadaan pendidikan pada masa pemerintahan Orde Baru. Keadaan pendidikan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Jika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, hanya menyebutkan madrasah saja yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pesantren, Ma'had Ali, Raudatul Athfal (taman kanak-kanak), dan majlis taklim telah masuk ke dalam sistem pendidikan nasional.

Kedua, kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan Islam. Kebijakan ini terlaksana dengan ditetapkannya anggaran pendidikan sebanyak 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya termasuk gaji guru dan dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu. Demikian pula pengadaan buku gratis, pengadaan infrastruktur, sarana prasarana, media pembelajaran, peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Ketiga, setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal tamat sekolah lanjutan pertama, yakni SMP atau Tsanawiyah yang disebut dengan program wajib belajar sembilan tahun. Program wajib belajar ini bukan hanya berlaku bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional, melainkan juga bagi anak-anak yang belajar di Lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Sebagai tindak lanjut dari program wajib belajar ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Kepada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan gratis tersebut, telah diberikan biaya bantuan operasional sekolah yang selanjutnya dikenal dengan istilah "BOS".

Keempat, penyelenggaraan sekolah bertaraf nasional (SBN) dan internasional (SBI), yaitu pendidikan yang seluruh komponen pendidikannya menggunakan standar nasional dan internasional. Visi, misi, tujuan, kurikulum, proses pembelajaran, sarana prasarana, manajemen pengelolaan, evaluasi, dan lainnya harus berstandar nasional dan internasional.

Kelima, kebijakan sertifikasi guru dan dosen bagi semua guru dan dosen baik negeri maupun swasta baik guru umum maupun guru agama, baik guru yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional maupun guru yang berada di bawah Kementerian Agama. Hal ini merupakan program peningkatan mutu guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Untuk mendukung program tersebut, selain pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru dan Dosen, juga mengalokasikan anggaran biaya pendidikan sebesar 20% dari total APBN.

Keenam, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK/tahun 2004) dan kurikulum tingkat satuan (KTSP/tahun 2006). Kurikulum ini tidak hanya menuntut peserta didik menguasai pelajaran, melainkan juga dituntut untuk memiliki pengalaman dalam proses mendapatkan pengetahuan tersebut.

Ketujuh, pengembangan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru (teacher centris) melalui kegiatan teaching, tetapi juga berpusat pada murid melalui kegiatan learning (belajar) dan research (meneliti).

Dengan pendekatan ini, metode yang digunakan dalam proses pembelajaran bukan hanya ceramah, dan bimbingan, melainkan juga diskusi, seminar, pemecahan masalah, penugasan, dan penemuan. Penerapan manajemen yang berorientasi pada pemberian pelayanan yang baik dan memuaskan (to give good service and satisfaction for all customers). Dengan pandangan bahwa pendidikan adalah sebuah komoditas yang diperdagangkan''agar komoditas tersebut menarik minat, maka komoditas tersebut harus diproduksi dengan kualitas yang unggul. Untuk itu, seluruh komponen pendidikan harus dilakukan standarisasi. Standar tersebut harus dikerjakan oleh sumber daya manusia yang unggul''dilakukan perbaikan terus-menerus, dan dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Berkaitan dengan hal ini, telah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi Standar Isi (kurikulum), Standar Mutu Pendidikan, Standar Proses Pendidikan, Standar Pendidik dan tenaga kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian.

KESIMPULAN

Pendidikan Islam pada masa sebelum penjajahan ditandai dengan Islamisasi yang sangat pesat. Hal tersebut berhasil membentuk masyarakat Islam yang mendorong lahirnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia pada masa sebelum penjajahan.

Pendidikan Islam masa penjajahan terbagi dua yaitu: “ pendidikan Islam masa Kolonial Belanda dan pendidikan Islam masa penjajahan Jepang”. Walaupun pendidikan Islam masa Kolonial Belanda sangat memprihatinkan, namun gerakan-gerakan pembaruan Islam tetap muncul dan membawa pendidikan Islam ke arah yang lebih baik. Pada masa penjajahan Jepang umat Islam leluasa mengembangkan pendidikan karena dihapusnya peraturan Belanda yang diskriminatif.

Pendidikan Islam pasca kemerdekaan menunjukkan perkembangan pendidikan Islam yang sangat pesat. Di awal Orde Lama, pendidikan Islam sudah tidak termarginalkan lagi. Pada masa Orde Baru “pendidikan Islam telah masuk kepada sistem pendidikan nasional”. Pada masa reformasi, berbagai kebijakan pemerintah yang tidak hanya berlaku bagi lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga berlaku pada semua lembaga pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama menunjukkan sudah tidak tampaknya dikotomi pendidikan dan diskriminasi pemerintah terhadap pendidikan agama.

SARAN

1. Sebagai umat Islam yang merupakan agama yang paling sempurna, kita sebaik-baiknya menjaga dan mengembangkan kebudayaan Islam terutama kita warga negara Indonesia yang memiliki banyak kebudayaan yang bernuansa Islami.
2. Dengan sejarah kebudayaan Islam, kita dapat mempelajari hasil karya, rasa, dan cipta orang-orang Islam di masa lalu, baik dalam bentuk sosial, budaya, ekonomi, politik, dan tata kehidupan lainnya.
3. Dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, kita dapat berdakwah bahwa penyebaran Islam di Nusantara dilakukan dengan pendekatan damai, adaptif terhadap budaya lokal, serta toleransi terhadap keberagaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrorah, Hanum. *Sejarah Pendidikan Islam*. Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1992.
- Atria, Rahmi Putri. “*Pendidikan Sosial Budaya Masyarakat Melayu Riau (Sebuah Warisan Kerajaan Siak Sri Indapura)*,” *Blog E=MC2*. <http://anjunofarofpki.blogspot.com/2013/07/pendidikan-sosial-budaya-masyarakat.html>. 3 Oktober 2014.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia; Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.

- Kompasiana.com, 23 November 2010. <http://sejarah.kompasiana.com/2010/11/23/sejarah-tokoh-tokoh-pendidikan-di-indonesia-dan-luar-negeri-320581.html> (7 Oktober 2014).
- Nata, Abuddin. *Sejarah Pendidikan Islam*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011.
- Online, Banten. “Pendidikan Islam di Zaman Penjajahan Belanda,” *Blog Informasi Banten dan Dunia Pendidikan*
<http://ensiklopebanten.wordpress.com/2012/04/16/pendidikan-Islam-di-zaman-penjajahan-belanda/> (7 Oktober 2014)
- Mastuhu. *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*. Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
Dikutip dalam Abuddin Nata. *Sejarah Pendidikan Islam*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011.
- Nizar, Samsul. *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007.
- Nursyariet, Aisyah. Desember 2014. *Pendidikan Islam di Indonesia dalam Lintasan Sejarah (Perpektif Kerajaan Islam)* https://journal.uinlauddin.ac.id/index.php/lentera_pendidikan/article/view/533
- Ramayulis. *Sejarah pendidikan Islam: Perubahan Konsep, Filsafat, dan Metodologi dari Era Nabi saw. Sampai Ulama Nusantara*. Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 2012